BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Dalam undang-undang No. 6 Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.[1] Undang-undang desa juga memberikan jaminan bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran Negara dan daerah yang jumlah berlipat jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Setiap desa diberikan tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangannya sendiri dan menyediakan informasi yang nantinya dijadikan pedoman sebagai penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang efektif dan relevan terkait seluruh transaksi keuangan dan kegiatan ekonomi selama proses operasional. Untuk menjadikan desa yang lebih baik, maju, mandiri dan sejahtera haruslah melakukan kewajiban yaitu

[1] Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 www.dpr.go.id UU_2014_6PDF diakses pada Sabtu tanggal 18 April 2020 pukul 16.30

pengelolaan keuangan desa dengan baik pula agar tidak terjadinya kecurangan dan penyelewengan dalam pengelolaan anggaran desa. Kemudian diperlukan adanya transparansi dan juga akuntabilitas sebagai bentuk keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dalam rangka menciptakan kinerja pemerintah yang semakin baik. Kualitas laporan keuangan yang disajikan adalah salah satu bentuk dari penilaian kinerja pemerintah desa selain itu sumber daya manusia yang dimiliki seperti kekayaan milik desa dan pengelolaan keuangan harapannya dapat lebih mandiri karena menjadi peran dan kewajiban serta bertanggungjawab untuk diterapkan dengan berprinsip kepada transparansi dan akuntabilitas.

Perwujudan akuntabilitas dan transparansi menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan pemerintah, saat ini telah menjadi isu yang penting didalam pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan desa juga semakin dituntut untuk dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, namun dalam kenyataannya di lapangan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih dapat dikatakan rendah.[2] Rendahnya akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat

[2] Manoppo, H., & Arie, F. V. "Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014", Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi. (September 2016), hal. 4. Diakses pada senin tanggal 20 April 2020 pukul 20.00

inilah yang mengakibatkan kegagalan administrasi, miskin keputusan politik dan tingginya tindakan korupsi. [3]

Faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan desa diantaranya seperti faktor sumber daya manusia yang kurang mendukung misalnya kurang mempublikasikan keuangan sehingga laporan keuangan tersebut kurang transparansi kepada masyarakat secara luas dan dirasa kemungkinan potensi penyelewengan dana masih cukup tinggi. Bercermin dari problematika yang ada maka pemerintah melalui Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) menciptakan suatu aplikasi keuangan desa yang tujuannya memudahkan aparatur desa dalam melaporkan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bermutu. Aplikasi tersebut adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi Siskeudes telah mengkoordininasi seluruh regulasi terkair keuangan desa, dirancang secara terintegritas, *user friendly*, serta memiliki sistem pengendalian internal yang melekat dan efektif dalam menghasilakan informasi keuangan. Hal ini tentunya akan memberikan rasa nyaman bagu pengelola keuangan di desa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa telah diberlakukan untuk seluruh desa di Indonesia mulai tahun 2016, dimana penerapannya tersebut secara bertahap. Pemerintah meminta Gubernur dan Bupati untuk memfasilitasi penerapan dan pemanfaatan aplikasi tersebut seperti diadakannya pelatihan

[3] Nyland, Kari and Pettersen, I. Johanne, ”Hybrid Controls and accountabilities in public sector management. Internasional Journal of Public Sector Management”, Vol. 22 Iss 2 pp. 105-120. Norway: Trondheim Business School. Diakses pada sabtu tanggal 20 April 2020 pukul 18.24

berupa sosialisasi dan bimbingan teknis.[4] Begitu juga Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek yaitu salah satu desa yang telah menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa sejak tahun 2016. Sistem ini membantu pemerintah mengelola keuangan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban keuangan desa harus sesuai dengan peraturan yang ada. Sebelum adanya aplikasi sistem keuangan desa ini pemerintah membuat laporan keuangannya secara manual, namun cara tersebut dianggap kurang efektif dalam penyusunan laporan keuangan.

Desa Pule merupakan salah satu desa di Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek yang telah menerapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa ini dengan harapan adanya penerapan aplikasi ini dapat membantu pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Sebelumnya pemerintah desa membuat laporan keuangan juga menggunakan cara yang manual yaitu menggunakan *microsoft Excel* atau aplikasi lain yang yang formatnya tidak standar. Hal inilah yang menyulitkan pemerintah kabupaten atau kota dalam mengevaluasi APBDes dan laporan keuangan desa. Selain itu, ada ratusan desa yang menggunakan aplikasi yang dibeli dari pengembang swasta, yang tidak diperbarui untuk memenuhi standar-standar regulasi. Dalam operasionalnya aplikasi ini harus membutuhkan perangkat komputer dan koneksi internet yang mendukung, namun di Desa Pule Kecamatan Pule

[4]http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2450/Mou-Kemendagri-dengan-BPKP-tentang-Keuangan-Desa.bpkp . Diakses pada minggu tanggal 1 November 2019 pukul 15.02

Kabupaten Trenggalek sendiri koneksi internet pun masih dikategorikan tergolong cukup susah berhubung lokasinya di pegunungan, kemudian pemahaman dari masyarakat terkait teknologi dan informasi masih tergolong rendah. Sumber daya manusia yang ada di desa tersebut juga dapat dikatakan kurang mampu mengadopsi teknologi disetiap unit pemerintahan desa. Sedangkan sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Selain itu, setiap tahunnya terdapat perubahan versi dalam aplikasi, dimana itu dirasa sulit bagi operator untuk mengikuti dari awal mengaplikasikannya. Meskipun diadakan pelatihan kembali namun rasanya kurang efektif ketika operator mulai menguasai versi tersebut dan setahun kemudian mengalami perubahan lagi. Melihat kondisi di desa tersebut sangat memungkinkan ketidakefektifan dalam penerapan aplikasi sistem keuangan desa, dan jika penerapannya tidak efektif bagaimana kemudian peran dari aplikasi tersebut dan bagaimana pemerintah dapat mengelola keuangannya dengan baik. Sedangkan dari pemerintah dituntut untuk dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabilitas. Peneliti hendak menganalisis peran aplikasi sistem keuangan desa utamanya dalam meningkatkan transparansi dan akuntanbilitas.

Dari beberapa data dan keterangan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek dengan judul **"Efektivitas Penerapaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Akuntabilias Dan Transparansi**

Laporan Keuangan Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek".

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penerapan aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan aplikasi sistem keuangan desa di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek ketika menghadapi kendala dalam penerapan aplikasi sistem keuangan desa?
4. Apakah penerapan aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek sudah efektif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.

3. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan oleh Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek ketika menghadapi kendala dalam penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.
4. Untuk mengetahui apakah penerapan Aplikasi sistem keuangan desa Dalam Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek Sudah Efektif

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau nilai guna, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan judul yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

   Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penambahan khazanah ilmu pengetahuan tentang penerapan aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan transparansi akuntanbilitas laporan keuangan di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek
2. Manfaat praktis
   a. Bagi pemerintah Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek

      Penelitian ini diharapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa dapat diterapkan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pertimbangan atau referensi dalam karya-karya ilmiah bagi seluruh civitas akademik di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung ataupun pihak lain yang membutuhkan.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi ketika akan melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

E. Identifikasi Penelitian Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengidentifikasi masalah mengenai efektivitas penerapan aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pada Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. Kemudian cara mengintegrasikan sumber daya manusia terhadap penerapan sistem keuangan desa serta dampak dari kegunaan sistem keuangan desa tersebut.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka keterbatasan penelitian ini sebagai berikut:

a. Menetapkan obyek penelitian yaitu di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.

b. Penelitian ini hanya melihat efektivitas penerapan aplikasi Siskeudes dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek

c. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan secara langsung dari narasumber dengan wawancara. Data sekundes didapatkan dari dokumen-dokumen dari kantor Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi konseptual

Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan atau organisasi mencapai tujuannya.[5] Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan meru[akan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu

[5] Mardiasmo, "*Efisiensi Dan Efektivitas"*. (Jakarta, 2017) hal. 134.

kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.[6]

Efektivitas merupakan ketepatan penggunaan suatu program untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Sehingga program tersebut dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan apa yang ingin dicapai.

b. Transparansi

Transparansi adalah suatu kegiatan yang dapat diketahui oleh banyak orang atau pihak yang dianggap berkepentingan dalam perumusan suatu kebijakan pemerintah, politik, organisasi atau badan usaha, yang di mana hal ini merupakan karakteristik dari *good governance* terkait transparansi yang mengatakan bahwa suatu kegiatan manajemen pemerintah tidak boleh ditutup.[7]

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik.[8]

Definisi Transparansi adalah keterbukaan pemerintah sumber daya publik kepada pihak pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi

---

[6] Benny Pekei, "*Konsep dan AnalisisEfektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku 1*",(Jakarta Pusat : Taushia,2016),hal.69

[7]Arifin Tahir, "*Kebijakan Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*" (Bandung: Alfabeta, 2015) hal. 30

[8] Mardiasmo, " *Akuntansi Sektor Publik"*,(Yogyakarta: ANDI,2002) hal.

keuangan dan informasi lainya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.[9]

Dari pemaparan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pemerintah harus terbuka dalam memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan juga pemerintah berkewajiban terbukanya dalam memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

c. Akuntabilitas

Akuntanbilitas adalah bentuk kewajiban penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya.[10] Kinerja pemerintah dan aparatnya adalah kualitas produk dan pelayanan publik yang dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Akuntanbilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan

---

[9] Mardiasmo, *"Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*",(Yogyakarta:ANDI,2004), hal. 30

[10] Penny Kusumastuti lukito, "*Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik*", (Jakarta : PT Grasindo, 2014), Hal. 2

sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban tersebut.[11]

Akuntanbilitas merupakan instrumen pertanggungjawaban atas konsep keberhasilan dan kegagalan tugas pokok serta fungsi organisasi, selain itu akuntanbilitas ini merupakan sistem kontrol tanggungjawab atas tugas dan fungsi maisng-masing jabatan.

d. Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi ini dibuat sederhana dengan tujuan agar lebih mudah dioperasikan oleh pengguna.[12]

Aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk memudahkan kinerja dari pemerintah desa dalam melaporkan keuangan desa. Penerapan aplikasi ini dalam laporan keuangan yang dihasilkan dapat sesuai dengan aturan yang berlaku kemudian laporan tersebut dicetak dan disampaikan kepada masyarakat desa sebagai bentuk transparansi laporan keuangan desa.

e. Laporan keuangan

Laporan keuangan menggambarkan tentang bagaimana susunan kekayaan yang dimiliki dan bagaimana cara memperoleh sumber kekayaan tersebut dan juga melihat perkembangannya, hal

[11] Ihyaul Ulum, "*Akuntnsi Sektor Publik",* (Yogyakarta, Graha Ilmu,2010), Hal. 40.

[12]Http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/leaflet-simda-desa.bkbp, diakses pada sabtu tanggal 18 April 2020, pukul 14.20

ini akan menunjukkan manajemen telah mengelola perusahaan dengan baik. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang disebut dengan siklus akuntansi. Laporan keuangan menunjukkan posisi sumber saya yang dimiliki oleh perusahaan selama satu periode.[13]

Sedangkan ada pendapat lain yang memaparkan bahwa definisi laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi kkeuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi laba. Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan pagi perseroan-perseroan untuk menambahkan daftar ketiga yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tidak dibagikan/laba ditahan. [14]

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses pencatatan keuangan yang merupakan pencerminan dari prestasi manajemen perusahaan pada suatu periode tertentu untuk alat informasi keuangan perusahaan dan komunikasi antar data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data tersebut.

2. Definisi Operasional

---

[13] Darsono dan Ashari, "*Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*",(Yogyakarta : CV. Andi Offset,2005), hal.4

[14] Munawir, "*Analisa laporan keuangan",* (Yogyakarta: Liberty, 2004), hal.5

Sacara operasional penelitian yang berjudul " efektivitas penerapan aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek" ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan diterapkannya aplikasi sistem keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) ini sudah berjalan efektif dan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pada objek penelitian yaitu di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penulisan skripsi, maka penulisan ini dibagi menjadi enam bagian bab, dari setiap babnya terdiri dari sub bab yang juga saling berkaitan dan berkesinambungan, saling mendukung dan menunjang. Sehingga pembahasan bab merupakan rangkaian berikutnya.

Adapun sistematika dari penyusunan laporan ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB I ini berisi a. Latar Belakang Masalah, b. Fokus Penelitian, c. Batasan Penelitian, d. Tujuan Penelitian, e. Kegunaan Penelitian, f. Penegasan Istilah, dan g. Sistematika Penulisan.

BAB I KAJIAN PUSTAKA

BAB II ini berisi a. Landasan teori, b. Penelitian Terdahulu, dan c. Kerangka Konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III ini berisi tentang a. Pendekatan dan Jenis Penelitian, b. Lokasi Penelitian, c. Kehadiran Peneliti, d. Data dan Sumber Data, e. Teknik Pengumpulan Data, f. Teknik Analisis Data, g. Pengecekan Keabsahan Data, h. Tahap-tahap Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

BAB IV ini menguraikan dari a. Paparan Data, b. Temuan Penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

BAB V ini berisi tentang pembahasan terkait dengan penerapan aplikasi sistem keuangan desa dalam kaitannya dengan transparansi dan akuntablitas laporan keuangan yang dilakukan oleh peneliti dan kemudian mencocokkan teori-teori dengan hasil temuan peneliti di lapangan.

BAB VI PENUTUP

BAB VI ini berisi tentang a. Kesimpulan keseluruhan dari hasil pembahasan dan b. Saran.

Tahap akhir dari skripsi ini akan diisi dengan daftar rujukan dan lampiran-lampiran yang ada kaitannya dalam penelitian dan mendukung isi.